

Analysis Of Budgeting And Budget Realization Reports In View Of Regional Regulation Number 9 Of 2021 (Case Study Of The Surabaya Population And Civil Registration Service)

Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya)

Putri Ayu Permatasari^{1*}, Maulidah Narastri²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{1,2}

putripermatasari5541@gmail.com¹, maulidah@untag-sby.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

One of the agencies that carries out regional autonomous implementing affairs in the area of population and civil registration also carries out the aforementioned tasks, which include formulating technical policies in the area of population and civil registration, administering government affairs and public services, fostering and carrying out tasks, and managing the administration of the service. The agency is headed by a Head of Service who reports to the Mayor of Surabaya and is in charge of the service's administration. The Surabaya Population and Civil Registration Service's Regional Regulation (PERDA) Number 9 of 2021 budget preparation process and budget realization report are to be reviewed, comprehended, and explained in detail. A qualitative research approach was used in this study. Researchers utilized both primary and secondary data in practice. The researcher used informants, including the head of the stillborn section, the head of the personnel subdivision, and the staff of the treasurer, to gather the data. The study's findings indicate that the Surabaya Population and Civil Registration Office has performed exceptionally well for the past two years, from 2020 to 2021. The rate of accomplishments in 2020 is 97.39 percent, which is considered effective. Furthermore, 93.88% of achievement in 2021 can be considered efficient. Therefore, if the average is met, the two-year spending achievements show 95.63 percent or are regarded as efficient.

Keywords: *Spending plan Readiness, Spending plan Acknowledgment Report, Monetary Administration*

ABSTRAK

Salah satu instansi yang menyelenggarakan urusan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil juga melaksanakan tugas tersebut di atas, antara lain merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan menyelenggarakan tugas, dan mengelola administrasi layanan. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Surabaya dan bertanggung jawab atas administrasi pelayanan. Peraturan Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (PERDA) Nomor 9 Tahun 2021 tentang proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran ditelaah, dipahami, dan dijelaskan secara rinci. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder dalam praktiknya. Peneliti menggunakan informan, termasuk kepala bagian lahir mati, kepala subbagian personalia, dan staf bendahara, untuk mengumpulkan data. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sangat baik selama dua tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Tingkat pencapaian pada tahun 2020 sebesar 97,39 persen yang dinilai efektif. Lebih lanjut, 93,88% pencapaian tahun 2021 dapat dikatakan efisien. Dengan demikian, jika rata-rata terpenuhi, capaian belanja selama dua tahun menunjukkan 95,63 persen atau tergolong efisien.

Kata kunci: Kesiapan Rencana Pengeluaran, Laporan Pengakuan Rencana Pengeluaran, Administrasi Moneter

1. Pendahuluan

Anggaran merupakan salah satu komponen utama untuk meningkatkan pelayanan publik serta mencapai suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sebelum melaksanakan suatu program, diperlukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan program. Salah satunya adalah anggaran, dalam lingkungan sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai tujuan atau target keuangan termasuk biaya keuangan dan transaksi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.

Penganggaran yang tidak efisien dan tidak berorientasi pada kinerja akan menyebabkan kegagalan program yang telah disiapkan sebelumnya. Sering dijumpai bahwa penyusunan anggaran seolah menjadi bagian tersendiri dari perumusan dan perencanaan strategis, sehingga keberhasilan pelaksanaan suatu anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan sasaran dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak akan menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam mengelola APBD dapat dilihat dari tingkat kinerjanya. Kinerja yang baik mencerminkan kondisi negara baik dan kinerja yang buruk akan mencerminkan kondisi negara yang buruk juga.

Pengelolaan keuangan daerah adalah perhitungan kebutuhan modal suatu organisasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perekonomian daerah. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat penting. Tujuan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang kegiatan keuangan pemerintahan negara atau daerah yang menunjukkan pemenuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membutuhkan strategi pengelolaan keuangan. Anggaran belanja merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pengambilan strategi yang akan digunakan, karena dengan adanya anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dapat merencanakan pengalokasian dana pendapatan dan belanja daerah serta dapat melakukan pengendalian keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi tolak ukur akan keberhasilan dalam penyerapan anggaran yang baik. Apabila terjadi perbedaan antara anggaran belanja dengan realisasinya maka dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji terkait penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran agar lebih efektif dan bertanggungjawab dalam membangun keselarasan antara penyusunan anggaran dan laporan pelaksanaannya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya Tahun 2021)"

2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sering digunakan untuk memenuhi akuntabilitas lembaga sektor publik kepada publik, agar pengelolaan keuangan lebih terbuka dan akuntabel. Akuntansi sektor publik merupakan solusi dari masalah kelangkaan sumber daya organisasi di

sektor publik, dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Definisi akuntansi sektor publik menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa dalam akuntansi sektor publik berkaitan terhadap penerapan serta perlakuan akuntansi yang terjadi dalam lingkup publik. Menurut (Sujarweni, 2015) bahwa akuntansi sektor publik merupakan semua kegiatan dari pencatatan kemudian mengklarifikasi serta pelaporan pada suatu transaksi ekonomi yang hasilnya akan mengeluarkan sebuah informasi keuangan untuk pihak terkait, yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Sedangkan menurut (Dwi Retmono, 2015) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa akuntansi sektor publik merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan yang memberikan informasi keuangan kepada sektor publik.

Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat mengukur berapa sumber daya yang diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Tahap penganggaran menjadi penting karena merupakan perencanaan awal dalam proses pelaksanaan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Anggaran yang tidak efisien dan tidak berorientasi pada kinerja akan mengakibatkan kegagalan dalam perencanaan anggaran yang telah disusun.

Menurut (Nafarin, 2013), mendefinisikan bahwa anggaran adalah rencana tertulis untuk kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat pengorganisasian dan alat pengawasan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pada umumnya adalah suatu rencana yang sistematis dari kegiatan-kegiatan yang diorganisasikan dan dinyatakan dalam satuan mata uang, barang atau jasa yang akan dibiayai dalam periode yang akan datang.

Anggaran Sektor Publik

Istilah anggaran sektor publik memiliki banyak arti, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda. Anggaran sektor publik disusun untuk membantu pemerintah meningkatkan pembangunan masyarakat dan mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif. Menurut (Mardiasmo, 2009), anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang berupa pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Adapun jenis-jenis akuntansi anggaran sektor publik yaitu Line Item Budgeting, Incremental Budgeting, Planning Programming Budgeting System (PPBS), Zero Based Budgeting (ZBB) dan Performance Budgeting.

Realisasi Anggaran

Menurut (Munandar, 2012), realisasi anggaran merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback dan follow up agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi. Sementara itu, laporan realisasi anggaran merupakan gambaran sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama satu tahun dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara tersanding.

Laporan Realisasi Anggaran setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan
- Transfer belanja
- Surplus Atau Defisit
- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan pembiayaan netto
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Peran Anggaran Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelapor setelah konsolidasi laporan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada fenomena-fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dan menganalisis dalam pembahasannya melalui observasi dan wawancara serta menggambarkan proses penyusunan dan realisasi anggaran yang di laksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Tempat penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang akan diperlukan penulis sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Waktu yang dibutuhkan untuk peneliti ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Jenis metode pendekatan penelitian kualitatif melihat pada fenomena dan fakta yang sesuai untuk mendukung penulis dalam pokok permasalahan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara menggali pengetahuan melalui penemuan dan pemahaman. Sedangkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

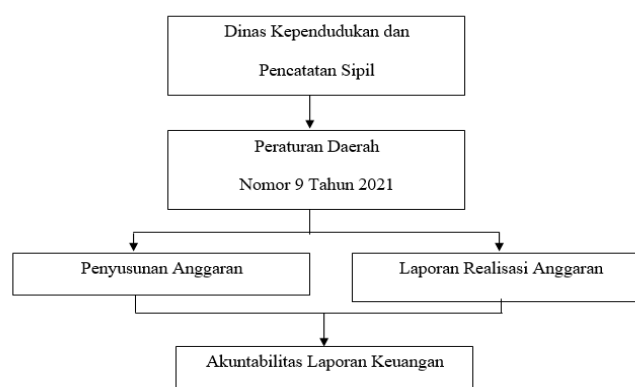
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, setelah melakukan observasi dan dokumentasi. Kemudian melakukan kegiatan wawancara kepada Kepala Bidang Lahir Mati, Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Staf Bendahara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Proses Penggolongan Data

Manajemen informasi adalah suatu bentuk manajemen informasi atau kombinasi dari manajemen informasi yang berbeda, yang menjadi bentuk yang berguna dan segera dapat digunakan. Dalam penelitian kualitatif jenis ini, data sementara yang ada dapat diolah dan dianalisis datanya secara bersamaan imelalui reduksi dan triangulasi data.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

4. Hasil Dan Pembahasan

Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan peran terpenting dalam pencapaian tujuan, begitu juga dengan halnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam melaksanakan semua kegiatannya berpedoman pada anggaran yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran di mulai dari pengumpulan data yang di rencanakan oleh setiap bidang mengenai sasaran dan program yang akan dilaksanakan. Dalam menyusun sasaran dan program tersebut dinas ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 dan juga berpedoman dari RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 yang mengacu pada iRPJMD Provinsi dan memperhatikan RPJMN.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya juga salah satu pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development tata ikelola organisasi yang baik adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dalam suatu organisasi serta berguna untuk mendorong tercapainya keberlanjutan organisasi melalui pengelolaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Pelaksanaan anggaran juga berperan penting dalam sistem anggaran berbasis kinerja Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kota Surabaya. Pelaksanaan anggaran tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi, produksi dan hasil yang dapat diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kota Surabaya. Tabel di bawah ini memuat informasi dari Laporan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Statistik Vital Kota Surabaya (LRA).

Berikut adalah perbandingan pelaksanaan anggaran tahun 2020-2021 yaitu.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Tahun 2020-2021

Tahun	Alokasi	Realisasi	%
2020	Rp 21.173.942.665	Rp 20.622.303.617	97.39%
2021	Rp 30,116,613,360	Rp 28,275,202,143	93.88%

Diketahui bahwa selama pandemi realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tergolong sangat baik pada tahun 2020 sebesar Rp 20.622.303.617 dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 28,275,202,143. Selisih anggaran pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 551.639.048 dan Rp 1.841.411.217. Namun untuk tahun anggaran 2021 program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya mengalami perubahan. Pada tahun 2020 terdapat 5 program dan 12 kegiatan berubah menjadi 6 program 17 kegiatan pada tahun 2021.

Adapun hambatan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya pada saat penyusunan anggaran yaitu terjadinya inflasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara, kenaikan gaji UMR per tahun di setiap OPD yang harus selalu di selaraskan dengan pagu anggaran yang sudah ada dan mengkoordinasikan pagu anggaran kepada setiap bidang yang membutuhkan waktu lama untuk menetapkan pembiayaan anggaran. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu adanya koordinasi antara bidang-bidang dengan tim penyusunan anggaran untuk mengurangi kesalahan dalam penyusunan anggaran serta tetap berpegang pada aturan yang ada agar penyusunan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penyusunan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dapat disimpulkan :

1. Proses penganggaran Dinas Kependudukan dan Pusat Statistik Kota Surabaya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain operasional yang harus jelas hasilnya, efisiensi (kecukupan harga) seperti inflasi dan kenaikan UMR, serta anggaran tahun sebelumnya.
2. Program yang telah disusun oleh setiap bidang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA). Dan akan mengadakan koordinasi untuk menentukan anggaran belanja agar selaras dengan pagu anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.
3. Pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kota Surabaya tahun anggaran 2020-2021 telah berlaku. Ternyata tingkat pencapaian tahun 2020 sebesar 97,39% yang dapat dikatakan efektif. Namun pada tahun 2021 tingkat pencapaiannya adalah 93,88%, sehingga bisa dikatakan cukup efektif. Jadi jika kita mengambil realisasi biaya rata-rata selama dua tahun, tingkat eksekusi adalah 95,63%, cukup efektif.

Berikut saran yang dapat menjadi masukan bagi penelitian sejenis lainnya, antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya harus mempertahankan kinerja belanja yang baik karena tidak ada target yang tercapai melebihi anggaran yang sudah direncanakan dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya.
2. Untuk pelaksanaan anggaran belanja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya telah meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah khususnya belanja modal, agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern masing-masing dinas dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif.
3. Agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik, efisiensi pengeluaran juga meningkat. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran untuk mencapai optimalisasi yang diinginkan sesuai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.

4. Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Kota Surabaya diharapkan dapat dipertahankan dan jika memungkinkan lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dalam hal pelayanan maupun pencapaian maksud dan tujuan.

Daftar Pustaka

- Ayu Givsa Inge Anersa Putri, G., & Lhaksmi Pramudyastuti, O. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. *Economics & Education Journal*, 4 (1).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Blog, G. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Pengertian Menurut Ahli, Tujuan, Jenis*. Diambil kembali dari gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/>
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). *Open Journal Systems*, 17 (1).
- Dwi Rohma, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Filemon Sinjal, J., & Gede Suwetja, I. (2022). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6 (1), 345 – 354.
- Fuad, M., Sukarno, E., & dkk. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A., & Syam Kusufi, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismayuli. (2021, September 10). finansialku. Diambil kembali dari Budget (Anggaran) – Jenis, Manfaat, dan Tujuan: https://www.finansialku.com/definisi-budget/#Manfaat_Anggaran
- Kota Surabaya.(2021). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kota Surabaya : Surabaya.
- Kota Surabaya.(2021). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Surabaya:Surabaya.
- Kresna. (2019, Desember). Keunggulan dan Kelemahan Anggaran. Diambil kembali dari konsultasi skripsi: <http://konsultasiskripsi.com/2019/12/19/keunggulan-dan-kelemahan-anggaran-skripsi-dan-tesis/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Narastri, M. (2019). 15 Pillars of Islamic Good Corporate Governance for The Corporate Level. ACHITS 2019.
- Parulian, S. d. (2015). *Anggaran*. Jakarta : Salemba Empat.
- Renaldi. (2021). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi BPPSDMP. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2 (1), 103 - 114.
- Sofiani, M. (2019). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8 (11).
- Sophian, S., & Rezi, V. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian*, 1(2).
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suwanda, W., & Pratiwi, D. (2018). Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Anggaran IPDN Kampus Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3 (1).

- Syahnur, I. (2022). academia. Diambil kembali dari PENGANGGARAN: <https://www.academia.edu/34932024/PENGANGGARAN>
- Taufiq Hidayat, M. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 27 (1).
- Wayan Ratna Sari, N., Sariana, K., Mega Utami, K., & Ayu Rysma Dewi, I. (2017). Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7 (2).